

POLITIK DOMINASI DAN DISKURSUS KEISLAMAN INDONESIA

Oleh: Surahman Cinu

Dosen Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Tadulako Palu.

Email: indraismail@gmail.com

Abstrak:

Politik Indonesia kontemporer dalam skala nasional (pusat kekuasaan) meski menunjukkan gejala bergerak ke arah pembentukan karakter bangsa yang pluralis, namun pada aras lokal justru hampir tidak memberi ruang bagi pembentukan karakter kebangsaan yang pluralis. Peristiwa kekerasan dan berbagai pelanggaran ajaran keagamaan di aras lokal, jelas menunjukkan satu konsolidasi politik demokrasi yang gagal, meski secara nasional politik demokrasi kita secara normatif menunjukkan domain pluralis. Namun, hal demikian sulit dijadikan tolok ukur bahwa proses pembentukan karakter Indonesia telah mengarah sebagai negara bangsa yang plural, sebagai sebuah cita-cita bersama.

Kata kunci: Politik, Islam, dan Indonesia

Pendahuluan

Sejarah perkembangan politik Indonesia modern pasca jatuhnya rezim Orde Baru, tidak selalu terfragmentasi pada anggapan bahwa politik relevan dengan demokrasi, kemudian berkontribusi pada pembentukan negara-bangsa (*nation state*). Banyak fenomena menunjukkan bahwa politik mewujudkan berdasarkan pada cita-cita primordial, bukan pada aras negara-bangsa. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa di masa transisi ini, gagasan demokrasi yang berkebangsaan secara universal belum menjadi bagian dari agenda politik kita membangun Indonesia yang lebih baik. Banyak peristiwa sosial yang terjadi mengindikasikan adanya harapan akan masa depan politik kita yang lebih baik.

Di sisi lain, banyaknya peristiwa konflik, baik antar masyarakat sipil maupun kekerasan atas nama negara terhadap warganya, dilakukan secara langsung, maupun tidak, seperti upaya pembiaran terhadap terjadinya kekerasan oleh kaum mayoritas terhadap minoritas, jelas menimbulkan satu sikap keraguan akan masa depan dan daya tahan demokrasi kita.

Argumentasi di atas merujuk pada sebagian wilayah di republik ini, dalam putaran politik lokal, tampil dengan wajah “garang”, hal ini terlihat terutama pada hubungan antaragama, terjadi fundamentalisasi keagamaan, label kafir dan sesat, disertai aksi kekerasan dari sebagian kelompok berpaham mayoritas kepada kaum minoritas serta berbagai

tindakan intoleransi lainnya. Peristiwa ini jelas menjadikan gerakan pluralisasi dalam demokrasi yang kita usung, terutama selama Orde Transisi menjadi terganggu. Anehnya negara sering membiarkan hal ini terjadi.

Nampaknya lontaran suara perubahan yang terdengar nyaring oleh para pelaku reformasi maupun dari kekuasaan politik, ternyata tidak sedahsyat lontarannya. Apakah memang demokrasi (setelah peralihan dari sistem totaliter) enggan mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin karena ia harus tunduk pada sesuatu memimjam logika kurva lonceng, kekuatan mayoritas.

Tekanan Mayoritas sebagai Akuntabilitas Politik

Di sini, nampak kita menemukan jalan buntu sesaat, ketika apa yang di gadang-gadang oleh para pemain demokrasi, dengan menyebutnya sebagai institusi peradaban, kemudian terjebak pada suatu format demokrasi mayoritas, seakan politik demokrasi kita, muncul ibarat tubuh sosial yang senantiasa referensinya pada kelompok mayoritas. Kita belum memasuki wilayah peradaban politik dengan salah satunya mempertimbangkan oleh apa yang disebut Lacan sebagai *le reel* (*the real*), sesuatu yang berada di balik fenomena, yakni noumena, demokrasi adalah keadilan dan kesetaraan.

Demokrasi berperadaban bukan sekedar menerjemahkan dan memaknai aspirasi, partisipasi ibarat tubuh sosial saat dilakukan scan, sekedar berhasil

menangkap fenomena yang ada, noumena menjadi sesuatu yang *le reel*, mengutip Lacan. Untuk kebutuhan diskusi ini saya lebih elok menerjemahkan ini sebagai keinginan minoritas. Pemaknaan eksistensi *the real* di atas sekaligus menjastifikasi pentingnya politik dibangun berdasar atas asas keadilan yang berperadaban. Satu sistem politik yang tidak sekedar merujuk pada diktator mayoritas, namun juga menyangkut hak-hak sipil warga keseluruhan.

Akuntabilitas politik berarti juga *the real*, ia harus dimunculkan sebagai sesuatu yang berada di balik fenomena. Problemnya, mereka yang merasa selalu benar, fundamentalis, gerakan pengkafiran menolak yang disebut *the real* tadi. Jika mereka melawan demokrasi sebagai politik pluralisme, tidak berarti, sebagaimana kata Goenawan Mohammad, “mereka berpegang pada kondisi teologis manusia”, namun kaum fundamentalis, para pelaku pengkafiran memaknai teks teologi sebagai sesuatu yang final, teks Tuhan selesai dirumuskan.

Politik Indonesia kontemporer dalam skala nasional (pusat kekuasaan) meski menunjukkan gejala bergerak ke arah pembentukan karakter bangsa yang pluralis, namun pada aras lokal justru hampir tidak memberi ruang bagi pembentukan karakter kebangsaan yang pluralis, salah satu indikatornya, pada otoritas kekuasaan ke-islam-an aras lokal dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, mengukuhkan fatwa tentang kesesatan paham Syiah *Itsna*

As'ariyah (paham *ahlul bayt*) kemudian mendesak MUI Pusat untuk mengukuhkan fatwa tersebut agar berlaku secara nasional. Sementara pengakuan syiah *Itsna As'ariyah* sebagai salah satu mazhab dalam Islam telah ditetapkan dalam konferensi ulama dan tokoh dunia Islam di Amman dan ditetapkan dalam bentuk deklarasi Amman.

Peristiwa kekerasan dan berbagai pelanggaran ajaran keagamaan di aras lokal, jelas menunjukkan satu konsolidasi politik demokrasi yang gagal, meski secara nasional politik demokrasi kita secara normatif menunjukkan domain pluralis. Namun, hal demikian sulit dijadikan tolok ukur, bahwa proses pembentukan karakter Indonesia telah mengarah sebagai negara bangsa yang plural, sebagai sebuah cita-cita bersama.

Sesungguhnya, karakter ke-Indonesia-an yang plural telah tampil pasca pemerintahan sentralistik Orde Baru, kitapun makin meneguhkan diri sebagai bangsa yang plural, berpihak pada ide-ide keberagaman. Meski demikian, sebagian eksistensi reformasi belum terbangun atas dasar kejelasan ideologi, mengantar bangsa ini pada tatanan struktur yang rapuh akan bangunan kebangsaan berbasis pluralisme masyarakat.

Hal ini ditandai oleh banyaknya konflik-konflik sosial atas dasar suku, etnis, bahkan juga pemaknaan terhadap agama seperti yang terjadi di Sampang di mana penzaliman oleh kaum mayoritas Sunni kepada kaum minoritas Syiah. Kaum minoritas Syiah terusir dari kampung halamannya, mereka tinggal di

tempat penampungan sementara gelandang olahraga. Semua penindasan terjadi atas nama ajaran agama, meski dengan mengakui Tuhan yang sama.

Hak-hak sipil kaum minoritas, semisal kaum syiah *inna As'ariyah* sangat lemah, salah satunya akibat kuatnya arus dugaan bahwa mereka tidak memiliki legitimasi sejarah di Indonesia, sehingga tidak memperoleh hak prerogatif untuk tinggal di bumi Nusantara ini. Berbagai pernyataan absurd demikian mengingatkan kita pada rezim sebelumnya, bahwa mereka yang tidak menerima Asas Tunggal Pancasila, tidak boleh tinggal di Indonesia. Nampaknya sifat-sifat kekerasan Negara Orde Baru telah terwariskan kepada masyarakat saat ini, terutama pada mereka yang fundamentalis

Sebagai kebutuhan diskusi, ada baiknya sejenak kita menengok dan mengapresiasi humanisme kita terhadap kelompok minoritas. Saya ingin batasi kilasan sejarah ini hanya pada ajaran Syiah *Itna As'ariyah*, kelompok minoritas lain tidak diulas. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan substantif: *Pertama*, mazhab Syiah *Itsna As'ariyah* memiliki akar historis kuat di Nusantara (dibahas selanjutnya) *Kedua*, paham Syiah *Itsna As'ariyah* diakui sebagai salah satu mazhab dalam dunia Islam sebagaimana telah dideklarasikan dalam konferensi Internasional Islam di Amman.

Peninggalan Syiah dalam Kebudayaan dan Seni

Banyak hadits diutarakan dalam ajaran *Ahlul Sunnah wal Jamaah* memberi

penghargaan khusus kepada para anggota keluarga Rasulullah. Mereka di tempatkan pada posisi tertinggi dan tidak diganggu gugat. Hadits yang ditulis dalam Sahih Sunan at-Tirmizi nomor 3787 tentang keutamaan keturunan Rasulullah. Hadits tersebut menggambarkan satu peristiwa *mubalah* (saya terjemahkan dengan sumpah akan keyakinan) ketika nabi Muhammad ditanyai oleh para pendeta Nasrasi, dengan apa dia memberi jaminan bahwa ajaran yang dia emban mengandung kebenaran. Nabi menghimpun empat orang anggota keluarganya, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husein. Mereka dilingkar di kain surban nabi seraya berdoa, “ya Allah, sesungguhnya mereka adalah keluargaku, hilangkanlah dosa daripada mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya” Ummu Salamah berada di sekitar keluarga suci ini, ia tidak masuk dalam lingkaran surban tersebut, iapun berkata, “*Apakah aku bersama mereka ya Nabi Allah*” Jawab Nabi “*Engkau tidak masuk dalam lingkaran ablul baitku, tapi kamu tetap dalam kemuliaan*”. Demikianlah salah satu hadits yang banyak dikutip, tidak hanya para pencinta *ablul bayt* nabi, juga dari kalangan *Ablul Sunnah wal Jamaah*.

Posisi dan kedudukan keluarga nabi dalam kebudayaan, termasuk sastra dan kesenian Melayu cukup signifikan. Dalam sastra Melayu kita mengenal tiga hikayat berkenaan dengan Imam Hasan dan Imam Husein saat masih kanak-kanak, takkala akan wafat, dan hikayat Tabot (lihat sub judul Sayyidina Husein dalam *Teks Klasik Melayu* oleh Mohd Faizal Bin

Musa halaman 153-172 pada buku *Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara* disunting oleh Dicky Sofjan, Juli 2013).

Pengaruh ajaran Syiah dalam sastra Melayu periode kedua atau awal sastra Islam (lebih jauh tentang hal ini lihat Vladimir Braginsky, 2004) cukup banyak berpengaruh. Hikayat Muhammad Hanafiah yang bercerita tentang tragedi berdarah yang menimpa Imam Husein dan 72 pengikutnya di Padang Karbala, dan tiga hikayah di atas juga bercerita tentang Karbala, menjadi bagian pembuktian bahwa Mazhab Syiah bukanlah “barang” baru yang diproduksi oleh pemerintah Iran dan dieksport ke Indonesia setelah Revolusi 1979.

Sejarah tentang masuk dan berkembangnya paham Syiah di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum revolusi 1979, sehingga, sangat layak diposisikan sejajar dengan ajaran Islam lain, seperti Sunni. Sebagai sebuah studi sejarah, suka atau tidak, kita pasti terjebak pada subjektifitas peneliti, sebab bersentuhan dengan penerapan metodologi. Cukup wajar jika muncul pertanyaan, apakah hikayat sastra dan peninggalan budaya Melayu yang bercerita tentang para Imam Syiah, hasil karya orang-orang Syiah atau sebaliknya hanya mendapat pengaruh Syiah, baik langsung maupun tidak.

Cukup sulit memahami bahwa cerita tentang tragedi Padang Karbala akan tertulis sangat apik dan mengharukan, jika karya sastra semisal Hikayat Muhammad Hanafiah, ditulis oleh mereka yang non

syiah, sehingga secara tegas Harun Jaafar¹ mengatakan bahwa ajaran Syiah berpengaruh langsung pada karya sastra Hikayat Muhammad Hanafiah, lebih jauh ia mengatakan bahwa:

“Umat Islam di Nusantara turut memuliakan tarikh itu dan tabut pernah diadakan di Aceh, Padang, dan lain-lain. Ini mungkin disebabkan oleh pengaruh Syiah yang datang lebih dahulu ke daerah itu dan kemudian dilemahkan oleh aliran *al-hadits* yang masih melekat dalam jiwa penduduk daerah itu. Hingga kini masih ada ummat Islam di Semenanjung Malaysia yang menyambut tarikh itu dengan menyediakan bubur Asyura (di sebagian wilayah Jawa bubur putih Asyuro mereka sebut sebagai bubur Hasan dan bubur merah Asyuro sebagai bubur Husein. Penulis). Bagaimanapun mereka gagal menyiahkan seluruh Ummat Islam di Wilayah ini karena dinasti Mamaluk mengirim Syaikh Ismail yang berhasil menghalangi perpindahan kepercayaan masyarakat ke mazhab Syiah” (2002: 129- 130).

Provinsi paling ujung Barat Indonesia juga telah lama mengenal ajaran Syiah. Ditengarai bahwa kontak masyarakat Aceh dan Persia (syiah) terjadi sebelum abad ke-17. Peradaban Aceh mundur ketika isu tentang *wahdat al wujud* dan fatwa Mekah bagi penghapusan wanita untuk menjadi pemimpin. Pasca itu,

Kerajaan Aceh dikendalikan oleh keluarga Jamal al Layl². Setelah peristiwa tersebut, tradisi syiah diposisikan sebagai warisan budaya yang dipraktikkan hingga saat ini. Dapat ditemukan dalam seni dan kebudayaan Aceh³

Meski demikian, Orang Aceh berupaya tidak mengklaim diri sebagai warga penganut Syiah, bagi mereka, penyebaran agama Islam bukanlah persoalan siapa yang memulainya, sebab menurut Bustaman-Ahmad para *endatu* (generasi tua penyebar Islam) yang datang ke Aceh bukan semata bersyiah, tetapi juga berdagang (Dicky Sofjan, 2013: 203).

Warga Aceh saat ini memaknai tradisi Syiah yang terwujud dalam seni dan kebudayaan Aceh, “sekedar” warisan masa lalu. Namun, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah Aceh masa lalu, termasuk Kerajaan Peureulak, menyimpan banyak tradisi Persia dan mewariskannya pada rakyat Aceh saat ini. Sebut saja misalnya, Lambang Kerajaan Peureulak menyimbolkan Asma Allah, Nabi Muhammad, empat keluarga Rasul yang masuk dalam lingkaran surban nabi dan tiga buah pedang Zulfikar milik Imam Ali bin Abi Tholib. Peringatan Asyuro di Aceh yang dirayakan secara meriah juga patut diapresiasi sebagai warisan *endatu*.

² Azyumardi Azra. (1999). *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press.

³ Bustaman – Ahmad. (2002). *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.

¹ Jaafar Harun. (2002). *Wacana Kesusastraan Melayu Klasik*. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. hlm. 129-130.

Di Sulawesi Selatan kaitannya dengan penyebaran Islam, kita akan bertemu dengan salah seorang ulama terkenal dari Persia, bernama Sayyid Jamaluddin Husein al-Kubra. Setelah petualangannya, ulama ini kemudian menetap di Wajo, tepatnya Belawa, sehingga nama salah satu kampung di wajo (sengkang) dinisbatkan dari eksistensi beliau, yaitu Belawa, berasal dari kata “baa + alawi. Baa dalam bahasa Parsi berarti bersama-sama, dan alawi adalah panggilan untuk keturunan Nabi Muhammad. Belawa berarti bersama-sama dengan keturunan nabi. Sayyid Jamaluddin Husein al-Kubra mengajar masyarakat di Belawa, ia termasuk keturunan Nabi Muhammad.

Di wilayah Sulawesi Tengah terdapat satu Perguruan Islam yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin Salim al-Jufry atau lebih populer dengan sebutan Guru Tua. Perguruan tersebut bernama alKhairaat, pesantren dan para santrinya tersebar di seantero wilayah Indonesia Timur. Institusi ini terbesar di wilayah tersebut. Saat ini belum ditemukan hubungan antara Guru Tua, pesantren alKhairaat, dan ajaran Syiah. Namun demikian, beberapa indikator dapat dijadikan sebagai pintu masuk mengetahui adakah relasi antara Guru Tua, perguruan Alkhairaat, dan Syiah *Itsna As'ariyah*. *Pertama*, gelar Sayyid beliau sebagai keturunan Nabi Muhammad. *Kedua*, berbagai syair beliau yang bercerita tentang Imam Hasan dan imam Husein. *Ketiga*, Tarekat “resmi” Alkhairaat adalah *Alawiyah*. Sebuah tarekat yang dianut

oleh Bani Alawi keturunan Imam Husein di Hadramaut⁴ Tiga argumentasi di atas cukuplah dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ajaran ahlul bait bukan sesuatu yang asing bagi Pesantren Alkhairaat.

Cukup banyak peninggalan berbentuk seni maupun kebudayaan yang merupakan warisan atau mendapat pengaruh dari ajaran *Albul Bait*. Tulisan ini sekedar menampilkan beberapa dari sekian warisan tersebut. Tulisan ini tidak memiliki pretensi melakukan studi tentang sejarah masuknya Islam, siapa penyebar pertama, Sunnikah atau Syiah, sebagaimana diskursus selama ini dan cukup menguras energi. Untuk kebutuhan tulisan ini, kita pahami sebagai sesuatu yang sekunder sifatnya. Kembali pada konteks semula tulisan ini, yaitu demokrasi dan pluralitas.

Argumentasi tentang seni dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Syiah, dapat dijadikan alasan tersendiri bahwa ternyata mereka juga menjadi penghuni awal wilayah Nusantara ini. Sehingga, klaim bahwa ajaran syiah adalah barang yang diproduksi kemudian diimpor setelah revolusi 1979 dan tidak layak menjadi penghuni di republik ini, menjadi sangat tidak masuk akal.

Indonesia hari ini, mestinya dibangun atas dasar pluralisme budaya dan agama berdasar kaidah-kaidah keadilan, karenanya menjadi sangat bergantung

⁴ Huzaimah T. Yanggo, et.al. (2013). *Sayyid Idrus bin salim al Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan Umat*. Palu: Yayasan Alkhairaat Palu. hlm.86

pada bagaimana mengelola berbagai persoalan dalam kerangka etnisitas dan keragaman agama. Sebab ia merupakan realitas sejarah bangsa. Konteks lainnya, arus besar gerakan demokrasi seringkali mengalami gesekan kuat dengan sikap primordial, akibat pemaknaan agama dan etnis bertentangan dengan demokrasi. Dalam kerangka demikian, mestinya terjadi kombinasi jelas dari dua sistem tersebut dengan demokrasi atas dasar saling memaknai, minimal tidak terjadi dikotomi. Bukankah agama juga bertindak sebagai teologi membebaskan dan terbuka untuk ditafsir, demikian pula dengan demokrasi juga sebagai ideologi terbuka.

Kesalahan mengantisipasi arus utama tersebut, berakibat fatal bagi bangsa ini, dan *nation* kita dibayang-bayangi oleh satu krisis tafsir budaya dan agama, di mana selanjutnya mengalami perpecahan (sebagaimana negara-negara Balkan). Memahami perbedaan karakteristik politik yang tampil pada aras nasional dan daerah. Jika di aras nasional demokrasi bergerak pada tataran multietnis, di mana pluralisme menjadi gagasan besar kebangsaan. Sebaliknya, di sebagian daerah menunjukkan bahwa demokrasi dibangun berdasar sentimen etnis dan agama (saat ini mazhab). Sehingga, penting membangun sebuah gagasan yang merujuk pada trend demokrasi lokal sebagai alternatif menghambat ruang demokrasi dengan label politik mayoritas (baca fundamentalis).

Gagasan demokrasi lokal penting dijadikan referensi bagi perkembangan

politik Indonesia ke depan, sebab, demokrasi lokal menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah politik kita. Di sisi lain, gagasan bagi terwujudnya demokrasi yang berada dalam sejarah masyarakat lokal diharapkan sebagai antisipasi membendung kuatnya arus utama gerakan politik lokal berdasar pada sentimen fundamentalisme agama dan etnisitas.

Pentingnya memberi pemaknaan terhadap konteks lokal, akibat kebutuhan melakukan redemokrasi pada tataran nasional. Dalam artian, persoalan demokrasi harus dipahami sebagai gerakan politik yang berbasis pada konteks lokal. Berbagai tatanan struktur dan budaya masyarakat lokal menjadi bagian bahasan yang mengkontribusi pemaknaan demokrasi nasional ke arah Indonesia sebagai *nation state*.

Demokrasi yang dibangun dari bawah dengan memperhatikan aspek-aspek adat, tatanan sosial masyarakat lokal, sejarah ketika dia bersintesa dengan politik kebangsaan. Hal demikian menunjukkan arah menuju sistem politik dan tatanan demokrasi dalam kerangka *nation state*. Diskursus tentang demokrasi lokal di setiap wilayah, dengan potret dan potensi yang berbeda tidak serta merta menafikan gerakan demokrasi nasional, bahkan sebaliknya, demokrasi dalam kerangka *nation state* tadi bergerak melakukan penguatan, di mana akhirnya, Indonesia dipahami sebagai cita-cita besar yang secara bersama-sama diperjuangkan. Demokrasi yang berbasis

lokal menjadi modal utama dan mata rantai memperkuat nasionalisme kebangsaan Indonesia.

Introduksi berbagai institusi demokrasi yang digerakkan secara elitis dan fundamentalis, guna membangun tatanan sosial masyarakat yang mapan, sebagai sebuah diskursus dan bagian dari gerakan demokrasi nasional, terbukti gagal merespon berbagai persoalan secara bermartabat. Bahkan, politik fundamentalis atas nama agama melakukan penindasan terhadap kelompok lain, justru memunculkan pertikaian terus-menerus.

Kesimpulan

Di poin ini izinkan saya bercerita tentang sebuah kampung kecil terletak di dataran tinggi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Wilayah itu memiliki empat desa, penduduknya hampir seluruhnya penganut Kristen Protestan. Terdapat satu desa bernama Tomado (tiga lainnya Anca, Poroo, dan langko semua penduduknya beragama Kristen Protestan) orang-orang Kristen di Lindu, khususnya Desa Tomado yang merupakan masyarakat adat (asli) daerah itu, mengizinkan orang Islam membangun masjid, kemudian, demi menjaga sikap toleransi yang diperlihatkan oleh warga Lindu beragama Kristen, sesama orang Lindu, kaum Muslim (pendatang) mengarahkan spiker (pengeras suara) masjid ke danau Lindu, sehingga saat azan dikumandangkan, tidak sampai mengganggu penganut Kristiani.

Fenomena toleransi masyarakat Lindu, meski nampak sederhana namun memiliki makna kuat, ternyata di wilayah terpencil dengan tingkat pendidikan sederhana dan dalam nuansa hukum adat yang ketat, ada sikap saling menghargai. Pada aras sangat sederhana ini, demokrasi berasas pluralis dipertahankan. Inilah yang kita sebut *nation building*. Fenomena ini perlu dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi, sehingga gerakan masyarakat Indonesia yang dikonstruksi dalam wacana *nation state*, dengan mengambil jalan demokrasi sebagai proses, perlu memperhatikan wilayah-wilayah domestik sebagai basis internal kebangsaan. Jika demikian, maka demokrasi lokal mestinya dikonstruksi bukan sekedar pengayaan budaya, tetapi dipahami sebagai kerangka politik nasional menuju tatanan masyarakat Indonesia yang “final”. Meski dari sana, berbagai tesis kembali diluncurkan sebagai bagian dari reformasi peradaban bangsa kita.

Daftar Kepustakaan

- Azyumardi Azra. *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Braginsky, Vladimir. *The Heritage of Traditional Malay Literature*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Bustaman – Ahmad. *Islam Historis:*

- Dinamika Studi Islam di Indonesia.*
Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Huzaimah T. Yanggo, et.al. *Sayyid Idrus bin salim al Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan Umat.* Palu: Yayasan Alkhairaat Palu, 2013.
- Jaafar Harun. *Wacana Kesusastraan Melayu Klasik.* Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2002.